

PENGARUH PEMERINTAH TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM DI INDONESIA

Saripah Aini
Universitas Tanjungpura Pontianak
saripahaini299@gmail.com

ABSTRACT

The development of MSMEs in Indonesia is very important considering their large number and spread throughout the country. As one of the significant economic sectors, the existence of MSMEs certainly has an impact on economic growth and improvement. With support from the government and MSME actors, it is hoped that the Indonesian economy can develop faster. In this study, the author aims to analyze how the role of the government influences the People's Business Credit (KUR) in driving the Indonesian economy, as well as identifying the challenges and obstacles faced. The approach used is qualitative with a literature study method, which focuses on the analysis of previous research results that are relevant to this topic. The influence of the government on the Indonesian economy is the main focus, with data sources coming from journal articles, books, e-books, websites, and others. In conclusion, the government has a major influence and is the backbone of the Indonesian economy, from job creation to contributions to export products. Although there are obstacles such as difficulties in accessing financing, digitalization, regulation, and product innovation, the government is trying through financing programs such as the People's Business Credit (KUR), business incubation, encouraging the use of digital technology, and providing business assistance.

Keywords: Role of Government, Economic Growth, People's Business Credit (KUR)

ABSTRAK

Perkembangan UMKM di Indonesia sangat penting mengingat jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh negeri. Sebagai salah satu sektor ekonomi yang signifikan, keberadaan UMKM tentu berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. Dengan dukungan dari pemerintah dan pelaku UMKM, diharapkan perekonomian Indonesia dapat berkembang lebih cepat. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah berpengaruh terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong perekonomian Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka, yang berfokus pada analisis hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Pengaruh pemerintah terhadap perekonomian Indonesia menjadi fokus utama, dengan sumber data berasal dari artikel jurnal, buku, e-book, website, dan lainnya. Kesimpulannya, pemerintah memiliki pengaruh besar dan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga

kontribusi dalam produk ekspor. Meskipun ada hambatan seperti kesulitan akses pembiayaan, digitalisasi, regulasi, dan inovasi produk, pemerintah berusaha melalui program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), inkubasi bisnis, mendorong penggunaan teknologi digital, dan memberikan pendampingan bisnis.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Kredit Usaha Rakyat (KUR)

A. Pendahuluan

Informasi hanyalah salah satu aspek keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu UMKM memenuhi kebutuhan modalnya. Salah satu prasyarat utama untuk memperoleh modal tersebut adalah agunan, yang harus diberikan bantuan yang lebih konkret oleh pemerintah daerah untuk membantu UMKM mengatasi kendala modalnya (Wardhana, 2017). Pengembangan UMKM dan kesempatan yang adil bagi pemberdayaan mereka di masa mendatang telah difasilitasi oleh komitmen kuat pemerintah. Namun, mengingat status ekonomi nasional saat ini, keingintahuan ini menjadi kurang mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini karena UMKM menghadapi berbagai masalah, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: masalah organisasi non-finansial/manajemen dan masalah keuangan. (Pusparani & Ningsih, 2024)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pemerintah untuk membantu UMKM dalam hal permodalan. UMKM yang menjalankan usahanya secara menguntungkan namun kesulitan mendapatkan pendanaan dari perbankan menjadi sasaran inisiatif KUR ini (Hasanah & Priantina, 2017). Perbankan juga menawarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan dana kredit agar menjadi lebih tangguh dan mandiri. KUR ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh penghasilan yang lebih banyak sehingga dapat kembali mendongkrak perekonomian masyarakat.

Dengan adanya kredit, masyarakat memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari kredit ketika sektor riil berkembang lebih pesat, yang pada gilirannya

membantu mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat yang bisa terjadi di mana saja. (Refi, Ermawati, & Ferdinal, 2022)

Program KUR adalah program kredit yang relatif baru jika dibandingkan dengan KUT, KKPE, dan PKBL, yang memiliki tujuan serupa dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil. Pemerintah sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap KUR, melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Rifai, 2019). Namun, berbagai temuan menunjukkan adanya ketergantungan antara dukungan anggaran di tingkat Pemerintah Daerah dan kemampuan mereka dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, guna memperkuat akses kredit dan mendukung pengembangan usaha.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran

penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya mendukung ekonomi nasional, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan negara. Selain itu, UMKM merupakan jenis usaha kecil yang didirikan atas inisiatif individu.

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pertama, UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan jumlah yang sangat besar, mereka menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kedua, UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja; dengan menciptakan banyak lapangan kerja, mereka membantu mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. Ketiga, UMKM berkontribusi pada distribusi hasil-hasil pembangunan, dengan menjual produk dan jasa, mereka mendistribusikan hasil produksi ke berbagai lapisan masyarakat. (Erlina & Lubis, 2022)

Dalam mengangkat topik ini, kami mempertimbangkan pentingnya

kontribusi pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. Sektor UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, strategi pengembangan UMKM untuk menghadapi dinamika pasar menjadi alasan utama pemilihan topik ini. Judul ini diambil untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi dan potensi UMKM, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutannya di tengah perubahan ekonomi global.

Menurut Ningsih & Pusparani (2024) UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi besar, terutama dalam penciptaan PDB dan penyerapan tenaga kerja. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menarik 64% dari seluruh investasi di Indonesia. Berdasarkan hal ini, jumlah UMKM di Indonesia sangat besar dan daya serap tenaga kerjanya signifikan, menjadikannya sebagai basis ekonomi nasional yang kuat.

Lembaga Keuangan Mikro berfungsi untuk mendukung kelancaran operasional UMKM serta mengelola dan mengembangkan

dana. Dalam konteks ini, lembaga keuangan bertindak sebagai bank yang memberikan pinjaman kepada UMKM untuk menyediakan permodalan. Tujuan bank dalam menyalurkan pembiayaan UMKM adalah untuk mempermudah pelaku usaha mikro dalam mendapatkan dana untuk usaha yang menguntungkan, mendukung pertumbuhan usaha, dan memperkuat usaha yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan (Ningsih & Pusparani, 2024).

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang bersifat Studi pustaka atau Library Research. Metode ini berfokus pada analisis beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan topik yang dibahas. Objek penelitiannya adalah terkait Pengaruh Pemerintah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Indonesia. Ruang lingkup data yang digunakan diambil dari artikel jurnal, buku, e-book, website dan lain sebagainya yang dibaca dan dianalisis untuk diolah menjadi

sebuah karya tulis. Analisis kualitatif akan digunakan untuk memahami dinamika dan proses yang terjadi dalam UMKM, seperti perilaku pelaku UMKM dan strategi yang digunakan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengacu pada Inpres 1/2010 dan Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ mengenai Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, hal ini menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat di wilayah masing-masing, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal dan kelayakan usaha dari pelaku UMKM.

Berbagai langkah tindak lanjut yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencakup: 1) Pembentukan Forum Komunikasi dan Monitoring Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang memiliki tiga fungsi utama: koordinasi, monitoring, dan analisis terhadap masalah dan kendala dalam penyaluran program KUR, yang

dilaksanakan melalui pertemuan rutin; 2) Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat yang melibatkan Bank Pelaksana dan Penjamin serta pelaku UMKM sebagai peserta dan target calon nasabah program KUR; 3) Pengembangan pendamping KUR yang bertujuan untuk mensosialisasikan KUR dan mengidentifikasi pelaku UMKM yang berpotensi mendapatkan pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat. (Rifai, 2019)

Ada beberapa alasan strategis untuk melibatkan Pemerintah Daerah dalam mendukung program KUR: 1) Pemerintah Daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, sehingga lebih dekat dengan penerima manfaat (pelaku UMKM) dari kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat; 2) Ketika UMKM telah tumbuh dan berkembang secara optimal, Pemerintah Daerah akan merasakan berbagai manfaat, seperti nilai tambah di wilayah, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, pajak yang meningkat, serta peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah. Oleh karena itu, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendukung KUR sangatlah penting. Dalam penelitian ini, salah satu variabel yang diamati adalah Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, kapasitas fiskal didefinisikan sebagai gambaran mengenai kemampuan keuangan masing-masing daerah, yang tercermin melalui penerimaan umum APBD untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai, dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Setiap indeks kapasitas fiskal di kabupaten/kota akan dihubungkan dengan proporsi alokasi belanja APBD untuk urusan Koperasi dan UMKM. (Aristanto, 2019)

Pengembangan usaha mikro melalui pemberdayaan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat secara nyata. Dukungan dari pemerintah daerah dimaksudkan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada, khususnya dalam mengembangkan usaha berskala kecil. Tujuan dari pengembangan usaha mikro adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan kemandirian mereka dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi. (Rahmadani, Hadrah, & Jusman, 2024). Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat program KUR. Misalnya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengatur pedoman pelaksanaan KUR bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyaluran kredit kepada UMKM. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp297 triliun, dengan fokus pada debitur baru dan debitur yang telah bergraduasi.

Dalam konteks pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat, regulasi memerlukan peran yang lebih besar dari pemerintah untuk mendukung keberhasilan program KUR. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah (Nurhemi & Suryani, 2019). Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tingkat kapasitas fiskal yang tinggi atau rendah di suatu

daerah akan mencerminkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja.

Penelitian Aristanto (2019) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat, kegiatan-kegiatan yang memerlukan peran dan dukungan pemerintah daerah memerlukan optimalisasi agar program-program yang berkaitan dengan ekonomi, dalam hal ini program Kredit Usaha Rakyat, dapat berjalan efektif dengan dukungan dari APBD.

Berdasarkan hasil penelitian Aristanto (2019) menjelaskan bahwa melalui sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh pemerintah memiliki ketersediaan dukungan anggaran dan keberadaan tenaga pendamping merupakan elemen penting dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat terbatasnya sumber daya manusia di setiap dinas daerah. Dengan adanya dukungan anggaran, hal ini akan membantu dalam penyediaan dan pembiayaan tenaga pendamping, yang pada akhirnya akan mendorong pelaksanaan sosialisasi menjadi lebih luas dalam hal volume kegiatan.

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM dapat bertindak selaku avalis dengan menandatangani suatu perjanjian kerjasama penjaminan dengan bank yang menyalurkan KUR. Pemerintah Daerah membentuk tempat- tempat yang akan dipergunakan untuk melakukan pemasaran bagi produk-produk UMKM seperti halnya sentra UMKM, Dewan Kesenian Rakyat Daerah (Dekranasda), dimana selain modal, tempat (lokasi) usaha juga menjadi permasalahan pokok seorang pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya.

Salah satu inisiatif pemerintah, KUR, menyediakan pembiayaan melalui lembaga keuangan dengan struktur penjaminan untuk memperluas opsi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas permodalan usaha dan mempersiapkan regulasi yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor riil, serta memberikan daya dorong yang lebih besar bagi UMKM. KUR atau Kredit Usaha Rakyat adalah jenis pinjaman untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pinjaman ini didukung oleh jaminan usaha yang

memadai dan produktif, tetapi memiliki batasan dan harus memenuhi standar bank. Inisiatif ini ditujukan untuk membantu UMKM yang dianggap produktif namun masih memerlukan pendanaan agar dapat berkembang. Program ini mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk layanan simpan pinjam, pertanian, manufaktur, kehutanan, perikanan, dan kelautan. (Susanto & Amanah, 2023)

KUR merupakan salah satu bantuan yang dapat digunakan oleh masyarakat UMKM. Bantuan diberikan meskipun usaha mikro tersebut belum memenuhi kriteria bankable, yaitu pelaku UMKM yang belum pernah memperoleh pembiayaan dari bank lain. Hal ini dapat ditentukan melalui Sistem Informasi Debitur (SID), yang menunjukkan bahwa permohonan kredit diajukan tanpa pernah menerima fasilitas kredit dari program pemerintah sebelumnya. KUR akan disalurkan berdasarkan perjanjian antara debitur dan lembaga yang menyalurkan KUR.

Program KUR dianggap memiliki dampak positif bagi pemberdayaan UMKM, sehingga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan peluang kerja, pendapatan pelaku usaha

UMKM, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu langkah yang sedang diambil oleh pemerintah adalah mendorong sektor UMKM melalui akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan langkah ini, sektor UMKM diharapkan menjadi lebih kuat, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Program KUR tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 64% dari total investasi, UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. KUR membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Peran lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam memberikan pinjaman kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dianggap sangat positif dan strategis. KUR hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan akses pembiayaan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, yang biasanya memiliki keterbatasan dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan tradisional.

Dengan bunga yang relatif rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel, KUR memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk meningkatkan modal usaha dan memperluas kapasitas produksi mereka. Melalui pembiayaan ini, para pelaku usaha dapat berinvestasi dalam berbagai aspek, seperti pengadaan peralatan baru, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar.

Keberadaan KUR diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, KUR tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pengembangan program KUR sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Rahmadani, Hadrah, & Jusman

(2024) pemberian KUR di Luwu Utara memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Faktor-faktor yang terkait dengan KUR dapat mendorong berbagai aspek kinerja UMKM, seperti pertumbuhan usaha, produktivitas, dan daya saing. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan yang disalurkan melalui KUR memberikan dampak positif bagi UMKM, yang dapat membantu mereka untuk tumbuh dan bertahan di pasar yang kompetitif.

Hasil penelitian Aristanto (2019) menunjukkan adanya dampak Kredit Usaha Rakyat terhadap biaya operasional pelaku usaha mikro dan kecil sebesar 63,2% dari mereka yang menerima KUR mengalami peningkatan biaya operasional. Di sisi lain, 34,7% pelaku usaha melaporkan bahwa biaya operasional mereka tetap, sementara 2,1% mengalami penurunan biaya operasional setelah menerima KUR. Hal ini terjadi karena dengan adanya penguatan permodalan, pelaku usaha menjadi lebih fleksibel dalam mengelola usaha mereka.

Keefektifitasan suatu program dapat diukur melalui kemampuan operasional dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan

program KUR Mikro dapat dilihat dari proses dan mekanisme kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jones dan Arif Rohman (2015) yang menyatakan bahwa program adalah salah satu komponen dalam kebijakan, di mana program tersebut berfungsi sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Demikian pula, program KUR Mikro merupakan inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2017), yang menunjukkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kinerja UMKM. Hal ini dapat dilihat dari lima aspek, yaitu ketepatan sasaran program, ketepatan waktu, ketepatan jumlah kredit, ketepatan beban, dan ketepatan prosedur.

E. Kesimpulan

Pengaruh pemerintah terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia sangat besar. Melalui kebijakan yang tepat, dukungan anggaran, dan pelaksanaan yang efektif, KUR dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kapasitas

dan daya saing UMKM, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang mendukung, pemerintah tidak hanya membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan akses keuangan yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. KUR bukan hanya sekadar program kredit, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanto, E. (2019). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(1), 1-13.
- Erlina, U., & Lubis, H. H. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Mandailing Natal. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 278-292.
- Hasanah, N., & Priantina, Y. (2017). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum

- di Indonesia Tahun 2007-2013. *Jurnal Informasi Akuntansi Dan Keuangan (INFAK)*, 3(2), 106-113.
- Ningsih, R. A., & Pusparani, N. A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pelayanan Dan Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Usaha Rakyat (KUR) Di BRI Unit Kasiyan*, 2, 103-107.
- Nurhemi, & Suryani, G. (2019). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 8(2), 183-205.
- Rahmadani, R., Hadrah, & Jusman. (2024). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Luwu Utara. *Scientific Journal Of Reflection*, 7(4), 1347-1355.
- Refi, C., Ermawati, E., & Ferdinal, A. (2022). Pengaruh Modal Sendiri Dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota *Journal of Social Science Research*, 3(4), 1253-1264.
- Rifai, B. (2019). Pengembangan Model Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Guna Pengurangan Kemiskinan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 17(3), 185-200.
- Susanto, K. F., & Amanah, L. (2023). Pengaruh Bantuan Stimulus Insentif Pajak dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(7), 3-18.
- Wardhana, M. (2017). Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku UMKM Dengan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Avalis. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 5(1), 1-17.